

SKRIPSI

KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM SDGs TERHADAP KERJASAMA BILATERAL ISU DEFORESTASI INDONESIA DAN JERMAN (2018)



**ISMAIL
1910521019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM SDGs TERHADAP KERJASAMA BILATERAL ISU DEFORESTASI INDONESIA DAN JERMAN (2018)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hubungan Internasional

**ISMAIL
1910521019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

Kebijakan Perubahan Iklim Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman 2018

disusun dan diajukan oleh

Ismail
1910521019

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 26 Agustus 2023

Pembimbing,



Achmad, S.IP., M.Si
NIDN: 0919047402

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Megah Pratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

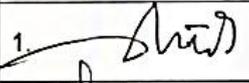
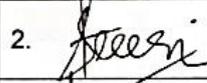
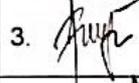
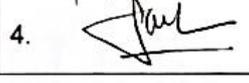
KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM SDGs TERHADAP KERJASAMA BILATERAL ISU DEFORESTASI INDONESIA DAN JERMAN (2018)

disusun dan diajukan oleh

ISMAIL
1910521019

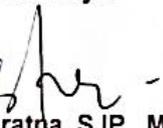
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 31 AGUSTUS 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
TIM PENGUJI

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP.,M.Si. NIDN: 0919047402	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Anggota	2. 
3.	Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I. NIDN: 0908069301	Anggota	3. 
4.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial




Andi Meganti Ratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ismail

NIM : 1910521019

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Kebijakan Perubahan Iklim SDGs Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman 2018" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dari daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ismail

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul, yang telah membawa cahaya keislaman kepada seluruh dunia.

Dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini sebagai hasil dari perjalanan akademik di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Fajar yang berjudul Kebijakan Perubahan Iklim SDGs Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman 2018.

Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur telah mendapatkan bimbingan yang sangat berharga dari bapak Achmad, S.IP., M.Si, selaku pembimbing utama. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan arahan yang tiada hentinya diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Bimbingan beliau telah membantu penulis dalam merumuskan masalah, menyusun kerangka teoritis, serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Ilmu, inspirasi, dan wawasan yang diberikan dalam perkuliahan telah membentuk pola pikir kritis penulis dan membantu dalam mengembangkan ide-ide dalam skripsi ini.

Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, dan sahabat-sahabat terdekat. Doa, semangat, dan dukungan yang tak pernah pudar dari mereka adalah pendorong utama penulis dalam menghadapi setiap tantangan dalam perjalanan ini.

Kepada teman-teman seangkatan yang telah berbagi pengetahuan, diskusi, dan pengalaman berharga, terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang telah memperkaya wawasan penulis. Interaksi dan diskusi dengan Anda semua telah memberikan sudut pandang yang berbeda dan mencerahkan perjalanan penelitian ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dari para pembaca guna perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Semoga apa yang telah dikerjakan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Agustus 2023

Ismail

ABSTRAK

KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM SDGs TERHADAP KERJASAMA BILATERAL ISU DEFORESTASI INDONESIA DAN JERMAN (2018)

Ismail

Achmad

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Fenomena ini membawa konsekuensi serius bagi ekosistem, sumber daya alam, dan ketahanan pangan serta membahayakan keberlanjutan masa depan planet kita. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman (FORCLIME) dalam isu deforestasi menggambarkan upaya nyata untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Laju deforestasi yang tinggi di Indonesia memiliki dampak krusial terhadap emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian masyarakat. Dalam sektor kehutanan Indonesia menyumbang 17% emisi secara nasional sebesar 1,1 miliar ton CO² pada 2017, degradasi dan deforestasi sebesar 60% terhadap produksi karbon. Penelitian akan melihat bagaimana strategi kebijakan perubahan iklim SDGs terhadap kerjasama bilateral isu deforestasi Indonesia dan Jerman (2018). Teori ini menggunakan teori green politic serta konsep kebijakan lingkungan global SDGs dan Kerjasama bilateral. Metode penelitian kualitatif dengan Teknik konten analisis.

**Kata Kunci: Deforestasi, FORCLIME, Kerjasama Bilateral, Perubahan Iklim
SDGs**

ABSTRACT

SDGs CLIMATE CHANGE POLICIES ON BILATERAL COOPERATION ON DEFORESTATION AREAS OF INDONESIA AND GERMANY (2018)

**Ismail
Achmad**

Climate change is a global challenge that affects human life and the environment. This phenomenon has serious consequences for ecosystems, natural resources and food security and endangers the future sustainability of our planet. Bilateral cooperation between Indonesia and Germany (FORCLIME) on the issue of deforestation illustrates a real effort to overcome the negative impacts of climate change and meet sustainable development goals. Indonesia's high rate of deforestation has a crucial impact on greenhouse gas emissions, biodiversity and people's livelihoods. In the forestry sector, Indonesia contributes 17% of national emissions of 1.1 billion tonnes of CO₂ in 2017, degradation and deforestation of 60% of carbon production. The research will look at how the SDGs climate change policy strategy relates to bilateral cooperation on deforestation issues between Indonesia and Germany (2018). This theory uses green politics theory and the concept of SDGs global environmental policy and bilateral cooperation. Qualitative research methods with content analysis techniques.

**Keywords: Deforestation, FORCLIME, Bilateral Cooperation, Climate Change
SDGs**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori.....	7
2.1.1 Kebijakan Lingkungan Global SDG'S.....	7
2.1.2 Kerjasama Bilateral.....	9
2.1.3 Green Political Theory.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Rancangan Penelitian.....	17
3.2 Kehadiran Peneliti.....	17
3.3 Lokasi Penelitian.....	17
3.4 Sumber Data.....	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.6 Analisis Data.....	19
3.7 Tahap-Tahap Penelitian.....	20
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	22
4.1 Kontribusi SDG's Dalam Rezim Perubahan Iklim.....	22
4.2 Dinamika Kerjasama Bilateral Indonesia-Jerman.....	25
4.3 Implikasi Teori Green Politik Dalam Kebijakan Perubahan Iklim.....	32

4.4	Dampak Strategi Kebijakan Perubahan Iklim	35
4.5	Keberhasilan dan Hambatan.....	39
4.6	Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektifitas Kerjasama.....	44
BAB V PENUTUP		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Deforestasi Wilayah Sasaran Forclime.....	29
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Fenomena ini membawa konsekuensi serius bagi ekosistem, sumber daya alam, dan ketahanan pangan serta membahayakan keberlanjutan masa depan planet kita. Dalam upaya mengatasi perubahan iklim, komitmen internasional dalam mengatasi perubahan iklim tercermin dalam berbagai perjanjian dan kerangka kerja, termasuk Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Rezim perubahan iklim, yang dibentuk oleh Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), menjadi landasan hukum dan normatif bagi negara-negara dalam menghadapi perubahan iklim melalui kerjasama internasional. Protokol Kyoto, sebagai bagian integral dari rezim ini, dirumuskan pada tahun 1997 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi pemicu perubahan iklim.¹

Selain itu, perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional yang diadopsi pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21) yang diselenggarakan di Paris pada Desember 2015. Tujuannya ialah untuk mengatasi perubahan iklim global dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C diatas level sebelum era industri, dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu menjadi 1,5°C.² Persetujuan perubahan iklim Paris telah diratifikasi oleh sebagian besar negara didunia dan menjadi landasan kerjasama global dalam menghadapi perubahan iklim.

¹ UNFCCC, what is the Kyoto Protocol.

² UNFCCC, The Paris Agreement.

Sementara itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi panduan bagi upaya global dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di berbagai dimensi. Tujuan SDGs mencakup 17 agenda transformasional yang merangkul berbagai aspek, dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan iklim, Tujuan 13 SDGs menegaskan pentingnya "Tindakan Terhadap Perubahan Iklim".

Namun, tantangan perubahan iklim tidak hanya memiliki dampak terhadap lingkungan, tetapi juga menghantui isu-isu pembangunan berkelanjutan. Salah satu isu yang mendapat sorotan serius adalah deforestasi. Deforestasi merupakan salah satu isu lingkungan global yang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Deforestasi berkontribusi pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi yang signifikan. Perkembangan teknologi dan globalisasi pada abad ke-20 mempercepat laju deforestasi di seluruh dunia. Penebangan hutan massal dilakukan untuk memenuhi permintaan industri kayu, ekspansi pertanian, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Negara-negara seperti Brazil, Indonesia, dan Kongo mengalami tingkat deforestasi yang tinggi.³ Dalam menghadapi tantangan ini, komitmen negara-negara terhadap perubahan iklim dan pencapaian SDGs menjadi semakin penting.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam isu deforestasi menggambarkan upaya nyata untuk mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Laju deforestasi yang tinggi di

³ BBC, "Deforestasi: Negara mana saja yang paling banyak membatasi hutan?".

Indonesia memiliki dampak krusial terhadap emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian masyarakat. Dalam sektor kehutanan Indonesia menyumbang 17% emisi secara nasional sebesar 1,1 miliar ton CO² pada 2017, degradasi dan deforestasi sebesar 60% terhadap produksi karbon.⁴ Beberapa penyebab deforestasi di Indonesia meliputi ekspansi perkebunan kelapa sawit, industri pulp dan kertas, industri kayu, serta pertanian skala besar seperti tanaman pangan dan perkebunan lainnya. Hilangnya hutan berarti hilangnya penyimpan karbon yang penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Deforestasi juga dapat mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang tergantung pada kegiatan berbasis pertanian tradisional, berburu, dan pengumpulan hasil hutan. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang ada di hutan dapat menyebabkan kemiskinan, migrasi paksa, dan konflik sosial di antara masyarakat lokal. Dengan melihat dampak atas isu deforestasi, perlu adanya komitmen tegas oleh negara-negara untuk segera melakukan Kerjasama dalam menanggulangi isu tersebut. Indonesia dan Jerman sebagai negara yang melakukan bentuk Kerjasama bilateral dalam penanganan isu deforestasi.

Indonesia dan Jerman memiliki hubungan bilateral yang kuat dalam berbagai bidang, termasuk lingkungan dan keberlanjutan. Program Forest and Climate Change (FORCLIME) adalah program kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, Forclime terdiri dari dua modul, yaitu modul Kerjasama Teknis (Technical Cooperation) dan modul Kerjasama Keuangan/Finansial (Financia Cooperation). Dalam modul Kerjasama Teknis, Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

⁴ FOREST DIGEST, "Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan".

ditugaskan oleh pemerintah Jerman sebagai pelaksana. GIZ adalah sebuah perusahaan internasional yang dimiliki oleh pemerintah Jerman dan telah bekerja di Indonesia sejak 1975. Mereka memiliki kantor di Jakarta dan beroperasi dalam berbagai bidang Kerjasama pembangunan.⁵

Sementara itu, modul Kerjasama Keuangan (Financial Cooperation) dilaksanakan oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Lembaga keuangan pembangunan Jerman. KfW bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan keuangan untuk program ini berdasarkan penugasan dari Kementerian Kerjasama ekonomi dan pembangunan Jerman (BMZ). Forclime bertujuan untuk mendukung upaya pengelolaan hutan dan perubahan iklim yang berkelanjutan di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui forclime, pemerintah Indonesia dan Jerman berkolaborasi untuk mempromosikan keberlanjutan pengelolaan hutan, konservasi biodiversitas, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negative deforestasi.

Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman terkait isu deforestasi memiliki potensi untuk memperkuat upaya perlindungan hutan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.⁶ Indonesia merupakan salah satu negara produsen kayu terbesar di dunia dan negara tujuan ekspor termasuk Jerman. Indonesia dan

⁵ FORCLIME. Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim.

⁶ WARDOYO, A. (2012). Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Jerman dalam DA-REDD Program FORCLIME di Indones (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).

jerman memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kedua negara menyadari bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang memerlukan tindakan kolaboratif dari semua negara.

Jerman sebagai salah satu pemimpin dalam bidang energi terbarukan dan teknologi hijau, memiliki keahlian dan sumber daya yang dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi terkait isu perubahan iklim dan deforestasi. Jerman sebagai negara dengan kemajuan dalam teknologi hijau dan inovasi berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pemantauan deforestasi. Pertukaran pengetahuan dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi isu deforestasi dan perubahan iklim. Pada tahun 2018, Kerjasama ini mencapai puncaknya dengan adanya proyek-proyek konkret yang dirancang untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan keberlanjutan hutan.

Melalui kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman, upaya dalam menangani perubahan iklim khususnya isu deforestasi dapat segera terlaksana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Kebijakan Perubahan Iklim SDGs Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman (2018)”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini ialah membahas bentuk strategi dalam kerjasama bilateral isu deforestasi Indonesia dan jerman pada tahun 2018 terhadap kebijakan perubahan iklim SDGs.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Strategi Kebijakan Perubahan Iklim Terkait Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Jerman Tahun 2018 Mempengaruhi Upaya Penanggulangan Deforestasi Serta Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana strategi kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman tahun 2018 mempengaruhi upaya penanggulangan deforestasi serta pencapaian SDGs.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberi referensi tambahan bagi disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konteks Kebijakan Perubahan Iklim SDGs Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman (2018).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pihak yang terkait mengenai *Kebijakan Perubahan Iklim SDGs Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman (2018)* serta menjadi bahan kajian bagi para akademisi maupun peneliti studi Ilmu Hubungan Internasional dan juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi segala pihak dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep dan Teori

Pada tinjauan konsep dan teori ini penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menjadi dasar dari penelitian ini.

2.1.1 Kebijakan Lingkungan Global SDG'S

Kebijakan lingkungan global adalah suatu kerangka kerja yang digunakan negara-negara diseluruh dunia untuk mengatasi masalah lingkungan global. Konsep ini melibatkan Kerjasama antar negara dalam mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati.⁷ Kebijakan lingkungan global mencakup sejumlah isu seperti isu perlindungan iklim, kebijakan energi berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati dan konservasi hutan, laut dan tanah. Hampir semua masalah tersebut memerlukan strategi menyeluruh untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan dipertimbangkan dalam bidang kebijakan lain, seperti juga Kerjasama dengan negara berkembang.⁸

Prinsip utama dalam konsep kebijakan lingkungan global adalah prinsip keberlanjutan, yang mengakui pentingnya mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada konsep ini, negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi tantangan lingkungan global. Konsep ini mengakui bahwa masalah lingkungan tidak mengenal batas negara dan membutuhkan kolaborasi antar negara untuk mencapai solusi yang efektif. Adapun tujuan kebijakan lingkungan global ialah:

⁷ Nasruddin, A. (2019). "Lingkungan Global".

⁸ BMUV. "What is international environmental policy about?".

- a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan dan tata Kelola yang inklusif.

SDG's merupakan perjanjian internasional yang mengadopsi kebijakan lingkungan global. SDG's diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut mencakup 17 tujuan dan 169 target yang berhubungan dengan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk lingkungan. Dalam hal ini SDG's memiliki pengaruh terhadap kebijakan perubahan iklim terhadap kerjasama bilateral isu deforestasi Indonesia dan Jerman. Kebijakan lingkungan yang diadopsi pada kerjasama tersebut bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kedua negara.⁹

SDG's memberikan acuan yang jelas dalam bentuk tujuan dan target yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, tujuan SDG's ke 13 yaitu tentang Tindakan terhadap perubahan iklim, tujuan SDG's ke 14 tentang kehidupan dibawah air, dan tujuan 15 tentang kehidupan darat.¹⁰ Indonesia dan Jerman memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan mengadopsi kebijakan yang relevan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

⁹ BAPPENAS. "Sekilas SDG's".

¹⁰ Leontinus, G. (2022). Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, Vol. (5)1, 43.

Pada kerjasama bilateral tersebut Indonesia dan Jerman mengadopsi goal SDGs 13 dan SDGs 15 yang juga akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

SDG's mendorong kerjasama internasional dan kemitraan antar negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan Jerman dapat saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mengatasi masalah lingkungan secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran penelitian dan pengembangan, transfer teknologi ramah lingkungan, pelatihan, dan kolaborasi dalam proyek-proyek lingkungan. SDG's dapat menjadi acuan yang mengarahkan upaya bersama dalam mengembangkan kebijakan dan program lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem laut.

Kebijakan lingkungan global yang tertuang dalam SDG's menjadi pedoman dalam kerangka Kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman terhadap kebijakan perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan Goal 13 SDG's yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Upaya dalam mengurangi. Selain itu Kerjasama tersebut juga mengacu pada upaya mencapai Goal 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem hutan.¹¹ Hal ini mencakup pengurangan laju deforestasi, penghentian kerusakan hutan, pengembangan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

1.4.2 Kerjasama Bilateral

¹¹ Bappenas. 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia, Pilar Pembangunan Lingkungan, Edisi II. 108-148

Kerjasama bilateral adalah bentuk kolaborasi antara dua negara dengan tujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara dan mencapai tujuan bersama.¹² Prinsip bilateralism didasarkan pada hubungan politik dan budaya yang terjalin antara dua negara. Beberapa contoh interaksi bilateral antara negara-negara meliputi penandatanganan atau perjanjian, pertukaran duta besar serta kunjungan kenegaraan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antar pemerintah melalui perundingan, penandatanganan perjanjian, serta metode lainnya dengan tujuan mencari solusi bersama terhadap isu yang mempengaruhi dua negara berdaulat disebut sebagai Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral menggambarkan interaksi saling memengaruhi antara dua negara, yang menciptakan keterkaitan timbal balik yang terlihat dalam bentuk kerja sama.¹³

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika strategi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam menghadapi permasalahan deforestasi yang terkait dengan perubahan iklim. Deforestasi, sebagai isu krusial dalam kerangka perubahan iklim global, mengharuskan negara-negara untuk bekerjasama dalam mengatasi dampaknya. Dalam hal ini, Indonesia dan Jerman menjalankan upaya kerjasama yang melibatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya finansial guna merumuskan kebijakan dan program yang berfokus pada perlindungan hutan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam analisisnya, penelitian ini menelusuri implementasi kebijakan perubahan iklim yang diadopsi oleh kedua negara, serta menjelaskan bagaimana

¹² Fajri, D. L. (2022). Kerjasama Bilateral adalah Kerjasama dua negara. Diakses dari <https://katadata.co.id/intan/berita/6394894e0dc3d/kerjasama-bilateral-adalah-hubungan-dua-negara-ini-contohnya>.

¹³ Harpiandi, N. M. B. (2019). Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi Digital 2017 (Disertasi Doktorat, Universitas Komputer Indonesia).

kebijakan tersebut telah membentuk dan mempengaruhi arah Kerjasama bilateral mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi dampak dari kerjasama tersebut terhadap tingkat deforestasi di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses kerjasama ini, seperti perbedaan budaya, prioritas politik, dan kendala ekonomi. Melalui pendekatan yang menggabungkan analisis kebijakan, studi empiris, dan literatur terkait.

Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (2005) karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara.¹⁴ Dengan demikian, hubungan bilateral mengacu pada hubungan apa pun antara dua pihak. Bilateralisme menyangkut hubungan atau kebijakan aksi bersama antara dua pihak. Bilateral adalah hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi dan keamanan antar dua negara. Dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di tiap-tiap negara.

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani mengatakan, dalam proses hubungan bilateral biasanya ditentukan oleh tiga motif yaitu:

1. Memelihara kepentingan nasional.
2. Memelihara perdamaian.
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.¹⁵

¹⁴ Sosiawan, M. A. (2019). Kerjasama pertahanan Indonesia-Jerman dalam pengadaan senjata.

¹⁵ Ibid.

Kerjasama antara pemerintah dua negara berdaulat untuk menemukan solusi bersama atas masalah yang melibatkan kedua negara melalui pembicaraan, kesepakatan, dan cara lain. Kolaborasi bilateral didefinisikan sebagai kerjasama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi antara dua negara, yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian, pertukaran duta besar, dan kunjungan kenegaraan. Prinsip dasar yang digunakan dalam diplomasi kerjasama bilateral adalah bahwa suatu negara akan mengupayakan kepentingan nasionalnya untuk memaksimalkan keuntungan, dan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antar negara.¹⁶

2.1.3 Green Political Theory

Sejak tahun 1970-an hingga kini, teori green politics muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan. Munculnya green politics juga didorong oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan yang tercermin dalam Gerakan aksi yang dilakukan untuk menjaga lingkungan.¹⁷ Awalnya green politik merupakan Gerakan aksi jalanan yang akhirnya mengalami perubahan kedalam bentuk institusi partai. Gerakan aksi tersebut melakukan transformasi dengan upaya untuk mengorganisir dirinya menjadi partai politik. Fenomena ini awalnya berkembang di negara-negara eropa, amerika, dan negara-negara Scandinavia. Ditingkat eropa, perkembangannya sangat dinamis di republic federal jerman. Kesuksesan partai hijau jerman menjadi sumber inspirasi

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Scott Burchill dan Andrew Linklater, Teori-teori Hubungan Internasional; *Theories of International Relation* (Bandung: Nusamedia, 2009), hal. 336

bagi Gerakan-gerakan lingkungan diberbagai negara. Partai hijau jerman disebut dengan “The Mother of Green Party” oleh partai hijau diseluruh dunia.¹⁸

Green politics theory adalah pandangan alternatif dalam hubungan internasional yang mengkritik perspektif tradisional Ketika dihadapkan dengan isu-isu spesifik, terutama isu lingkungan yang menjadi fokus utama. Green politik juga memiliki fokus utama untuk menciptakan keadilan dengan menyadarkan manusia akan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya.¹⁹ Green politik memandang lingkungan sebagai aspek yang krusial dalam analisis politik dan perumusan kebijakan, mengakui bahwa aktivitas manusia, terutama dalam konteks ekonomi dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan.

Menurut Dyer H, dalam green theory lingkungan hidup menjadi aspek penting sebagai landasan pemikiran utama. Berbagai perilaku dan aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya krisis lingkungan hidup. Green theory muncul sebagai kritik terhadap teori hubungan internasional tradisional yang terlalu berpusat pada manusia (human-centered) dan mengabaikan peran lingkungan hidup dalam analisisnya. Green theory menentang pandangan antroposentris. Pandangan antroposentris merupakan pandangan yang menempatkan manusia sebagai yang paling utama.²⁰

Selanjutnya Eckersley memberikan karakteristik green politics dalam kerangka ekosentrisme, yang menolak pandangan anthropocentric dimana nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ini menempatkan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan. Paham ekosentrisme menjadi prinsip

¹⁸ Apriwan, Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional, Jurnal Multiversa Jurnal International Studies, vol. 2(1) 39

¹⁹ KOMAHI. 2021. “Green Politics”.

²⁰ Dyer, H.C. (2020). Teori Hijau (Green Theory). In T. A. Mukti, Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Komojoyo Press) hal. 115

utama dalam green politics. Pendekatan ekosentrisme menfokuskan perhatian pada lingkungan atau ekologi. Dengan memprioritaskan ekosentrisme, green politics mengadvokasi perlindungan lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup ekosistem.²¹

Green politik merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi. Pendekatan green politics menyediakan instrument yang dapat digunakan untuk menganalisis, merencanakan program lingkungan, dan mencapai kelestarian lingkungan. Melalui implementasi politik berbasis green politics, seperti regulasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, dalam upaya penyelamatan dan perbaikan lingkungan yang terdampak deforestasi. Green politik didasarkan pada 3 prinsip utama menurut Jhon Barry diantaranya:²²

- a. Sebuah teori distribusi (intergerenasional) keadilan
- b. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi
- c. Usaha untuk mencapai kelangsungan ekologi

Dalam Kerjasama bilateral isu deforestasi Indonesia dan Jerman, green politics memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim dan tindakan yang berkelanjutan. Teori ini menekankan perlindungan lingkungan sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Dalam konteks ini, Kerjasama antara kedua negara harus memprioritaskan perlindungan hutan dan ekosistem yang terancam degradasi dan kerusakan. Teori ini menekankan pendekatan yang berkelanjutan dalam

²¹ Eckersley, R. (2007). Green Theory. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press, hal. 247

²² Barry, J. (2014). Green political theory. In *Political ideologies: An introduction*. Routledge, hal 154

pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Hal ini menuntut implementasi kebijakan dan Tindakan yang tidak hanya melindungi hutan saat ini, tetapi juga memastikan kelestarian dan pemulihan lingkungan dalam jangka panjang.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan pada penelitian ini. Pertama jurnal penelitian yang tulis oleh Fickny Djody Turangan yang berjudul “Peran APRIL GROUP Dalam Program Restorasi Hutan di Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019”.²³ Penelitian tersebut menggunakan Green Politics Theory sebagai landasan pemikiran untuk menjelaskan peran dari perusahaan APRIL Group dalam merestorasi hutan gambut di provinsi Riau. Peneliti menemukan APRIL Group sebagai perusahaan yang juga menjadi aktor penting dalam permasalahan lingkungan hidup. Dalam program tersebut APRIL group berperan penting dalam pendanaan program maupun menyediakan fasilitas pendukung untuk memperlancar dan mengefektifkan program restorasi ekosistem riau serta mencegah terjadinya kebakaran hutan gambut, APRIL Group juga ikut melakukan perubahan dalam proses bisnisnya menjadi ramah lingkungan dan sustainable sesuai dengan kebijakan komitmen APRIL 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa APRIL Group sebagai perusahaan yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan menjadi solusi penyelesaian masalah krisis iklim.

Kedua jurnal penelitian oleh Grace Frestisa yang berjudul “Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas

²³ Turangan, F. D. (2022). *Peran April Group dalam Program Restorasi Hutan di Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019* (Disertasi Doktoral).

Ekspansi”.²⁴ Penelitian tersebut menggunakan perspektif Green Politics Theory dalam menganalisis permasalahan deforestasi di Papua. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa cara pandang yang tepat dalam menangani kasus deforestasi terkait aktivitas ekspansi adalah dengan menggunakan ekosentrisme yang mengutamakan kelestarian ekologi sebagai prioritas, pemerintah daerah di Indonesia yang sudah berhasil menerapkan green politics theory dalam landasan politik dan konstitusinya. Pemikiran yang ekosentris mampu menjaga kestabilan dan konsistensi sehingga green politics theory dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi deforestasi terkait ekspansi meskipun rezim dialihkan.

Ketiga jurnal penelitian Gita Azzahra Aisyah yang berjudul “Kebijakan Perubahan Iklim Australia Pada Masa Pemerintahan Scott Morrison Terhadap Australian Bushfires Periode 2019-2020”.²⁵ Penelitian tersebut juga menggunakan Green Politics Theory dalam menganalisis kebijakan perubahan iklim Australia pada masa pemerintahan tersebut. Dimana Australia merupakan negara yang seringkali mengalami musim kebakaran yang disebabkan oleh perubahan iklim alami maupun campur tangan manusia. Kebakaran Australia pada tahun 2019-2020 yang dikenal dengan Black Summer menimbulkan banyak kerugian serta ancaman masyarakat terhadap respon pemerintah dalam menangani perubahan iklim. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Scott Morrison berfokus terhadap sustainable energy dengan fokus rendah emisi dan terbarukan, selain itu perubahan iklim saat ini juga menjadi salah satu ancaman keamanan nasional karena dampak yang ditimbulkan Australian Bushfire.

²⁴ Hutabarat, G. F. I. (2022). Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, vol. (7)2, 59-76.

²⁵ Aisyah, G. A. (2022). Kebijakan Perubahan Iklim Australia pada Masa Pemerintahan Scott Morrison terhadap Australian Bushfires Periode 2019-2020 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk rancangan penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan validasi data.

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sederhana dengan fokus pada analisis dokumen terkait kebijakan perubahan iklim, isu deforestasi, dan Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman pada tahun 2018.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti menjadi kunci sebagai instrument dan pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat penting karena tugasnya mencakup pengumpulan data. Ini merupakan salah satu karakteristik penting dari penelitian kualitatif dimana peneliti secara mandiri mengumpulkan data. Selain itu, penulis juga bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan dan analisis dari berbagai sumber data dan literatur yang ada sebelumnya. Sumber data atau literatur yang dimaksud meliputi referensi buku, jurnal, atau skripsi yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara pustaka, yang berarti lokasi penelitian menjadi penting untuk mendukung referensi dan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di beberapa lokasi sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Fajar sebagai sumber utama referensi yang tersedia secara fisik.
2. Perpustakaan online dari beberapa universitas di Indonesia sebagai sumber informasi elektronik yang dapat diakses secara luas.

3. Sumber-sumber lain yang ditemukan secara online, seperti jurnal elektronik, situs web resmi, dan database online yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan melakukan penelitian di berbagai tempat tersebut, diharapkan penulis dapat mengumpulkan dan menggunakan sumber-sumber yang beragam untuk mendukung penelitiannya secara komprehensif.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui metode seperti survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau studi kasus. Dimana data primer ini merupakan data yang belum pernah dipublikasi sebelumnya dan dihasilkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, majalah, panduan, situs web, serta lembaga dan institusi terkait. Penulis membutuhkan data yang relevan dengan penelitian ini tentang Kebijakan Perubahan Iklim Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Indonesia dan Jerman (2018).

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tangan pertama yang terdapat dalam literatur yang relevan. Sumber data primer ini akan mendaji dasar yang kuat untuk mendukung analisis dan temuan penelitian mengenai Kebijakan Perubahan Iklim Terhadap Kerjasama Bilateral Isu Deforestasi Antara Indonesia dan Jerman (2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode library research untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data-data tersebut diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, serta berbagai media lainnya, termasuk internet dan surat kabar harian baik dalam bentuk cetak maupun online,

Melalui metode library research, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, artikel, internet, dan surat kabar harian merupakan sumber yang beragam dan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan kerangka penelitian.

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung analisis dan temuan penelitian mereka tentang topik yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi. Pendekatan ini digunakan untuk mengintergrasikan data yang dikumpulkan dengan literatur dan sumber data lain yang telah diarsipkan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dan temuan berdasarkan upaya peneliti dalam penelitian tersebut.

Dengan menggunakan metode analisis ini, peneliti berusaha untuk menganalisis hasil penelitian, khususnya dalam menggambarkan kebijakan perubahan iklim terkait isu deforestasi dalam konteks Kerjasama bilateral anatar Indonesia dan Jerman pada tahun 2018. Melalui analisis konten, penulis akan mengidentifikasi dan menggolongkan informasi yang relevan dari data yang telah

dikumpulkan. Selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan dan temuan yang dapat memperkaya pemahaman tentang isu tersebut.

Metode analisis konten ini memberikan pendekatan sistematis dan objektif dalam mengolah data yang ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyajikan deskripsi yang komprehensif tentang kebijakan perubahan iklim terkait isu deforestasi terhadap kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman (2018).

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan guna mencapai tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validasi data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari keseluruhan bab yang ada pada penelitian skripsi ini. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang

dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca, baik mahasiswa ataupun dosen yang ingin melakukan penelitian yang memiliki relevansi atau korelasi dengan judul penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, akan diuraikan analisis mendalam serta pembahasan terkait strategi kebijakan perubahan iklim dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman terkait isu deforestasi pada tahun 2018. Analisis akan dilakukan berdasarkan tiga konsep utama, yaitu rezim internasional SDG's, kerjasama bilateral, dan teori green politik. Pembahasan akan mendalam pada dampak, keberhasilan, hambatan, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dalam mengatasi deforestasi dan implikasinya terhadap perubahan iklim global.

4.1 Kontribusi SDG's Dalam Rezim Perubahan Iklim

Agenda SDG's yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 memberikan kerangka kerjasama global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.²⁶ Dalam konteks kerjasama bilateral Indonesia-Jerman mengenai deforestasi, SDG's berperan sebagai acuan utama dalam merumuskan strategi kebijakan. Indonesia dan Jerman sama-sama memiliki komitmen untuk mencapai berbagai target SDG's terkait lingkungan, termasuk penanganan deforestasi.

Penerapan konsep SDG's dalam hubungan bilateral ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi deforestasi tidak hanya merupakan tanggung jawab nasional, tetapi juga komitmen global. Hal ini memberikan legitimasi internasional dan mendukung kerjasama dalam hal teknologi, pengetahuan, dan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

²⁶ UNDP. What are the sustainable development goals.

SDG's mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Tujuan 13 dari SDG's, yaitu "Tindakan untuk Iklim" (Climate Action), secara khusus menekankan perlunya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam kerangka ini, upaya mengurangi deforestasi dan menjaga keberlanjutan hutan menjadi relevan karena hutan memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga ekosistem yang sehat.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Jerman terkait isu deforestasi, SDG's berfungsi sebagai acuan bersama yang mengarahkan agenda dan tujuan kerjasama. Baik Indonesia maupun Jerman, sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan bilateral, memiliki komitmen untuk mencapai target-target SDG's. Oleh karena itu, kerjasama bilateral ini bergerak sejalan dengan agenda global yang telah ditetapkan oleh PBB.

Dalam kerangka isu deforestasi, SDG's menjadi panduan bagi pemerintah Indonesia dan Jerman dalam merumuskan strategi kebijakan perubahan iklim yang komprehensif dan berkelanjutan. Misalnya, tujuan 15 dari SDG's, yaitu "Kehidupan Darat" (Life on Land), menegaskan perlunya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan degradasi lahan, dan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hal ini mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam penanganan deforestasi.

Selain itu, SDG's memberikan legitimasi internasional bagi kerjasama bilateral. Dalam hal ini, upaya penanganan deforestasi dan dampak perubahan iklim tidak hanya dipandang sebagai kebijakan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap tujuan global. Hal ini dapat meningkatkan komitmen kedua

belah pihak dalam mendukung kerjasama dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Integrasi konsep SDG's dalam kebijakan perubahan iklim menghasilkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dalam hal deforestasi, strategi kebijakan dapat mencakup upaya melestarikan hutan untuk menjaga keanekaragaman hayati (SDG 15), memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal (SDG 1 dan 2), serta memastikan adanya akses ke air bersih dan sanitasi (SDG 6) yang terkait dengan fungsi hutan dalam menjaga sumber air.²⁷

Lebih jauh, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dapat mencakup berbagai proyek yang berkontribusi pada tujuan SDG's secara keseluruhan. Ini bisa termasuk program rehabilitasi hutan, pengembangan energi terbarukan, serta pendekatan berkelanjutan dalam sektor pertanian dan industri. Penyusunan peta jalan (roadmap) tujuan pembangunan berkelanjutan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (TPB KLHK) merujuk pada dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB 2015-2019, lampiran peraturan kepala Bappenas nomor 7 tahun 2018. Didalam RAN tersebut dicantumkan beberapa indikator kegiatan KLHK yang masuk ke dalam tujuh tujuan Pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 3 (kehidupan sehat dan Sejahtera), tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan 9 (industry, inovasi, dan infrastruktur), tujuan 11 (kota dan pemukiman berkelanjutan), tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), dan tujuan 15 (ekosistem darat).²⁸

²⁷ FORCLIME.org

²⁸ FORCLIME.org

Mengacu pada SDGs poin ke 13 pada Kerjasama Indonesia Jerman bertujuan untuk mengurangi emisi sebesar 29% dan 41% dengan dukungan internasional 2030, serta untuk melakukan adaptasi iklim pengukuran.²⁹ Mengacu poin ke 15 SDGs bertujuan untuk mendirikan 629 hutan unit pengelolaan (FMU) untuk tata Kelola hutan yang lebih baik untuk tahun 2019, serta untuk mempercepat penjabaran batas hutan dan akses Masyarakat terhadap pemetaan Kawasan hutan.³⁰ Dengan demikian, kerjasama ini melampaui isu tunggal deforestasi dan memberikan dampak yang lebih luas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini konsep SDG's memiliki peran sentral dalam memberikan landasan dan arahan bagi upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam konteks kerjasama bilateral Indonesia-Jerman mengenai isu deforestasi, SDG's menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi kebijakan perubahan iklim yang komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi SDG's dalam kebijakan ini menciptakan hubungan yang erat antara upaya nasional dengan agenda global, dan menghasilkan dampak positif yang lebih luas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

4.2 Dinamika Kerjasama Bilateral Indonesia-Jerman

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam isu deforestasi mencerminkan semangat kolaborasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Gagasan ini terwujud dalam berbagai bentuk kerjasama, seperti pertukaran pengetahuan teknis, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan dukungan finansial untuk program-program rehabilitasi hutan dan pengurangan emisi.

²⁹ GIZ. Supporting Indonesian Partners in Achieve the SDGs. 2017

³⁰ *Ibid.*

FORCLIME mengadopsi pendekatan multi-tahap dalam mengembangkan posisi politik yang diperlukan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Adapun metodenya adalah sebagai berikut:³¹

1. Dalam pendekatan nasional, FORCLIME bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merancang dan melaksanakan reformasi kelembagaan terkait hukum dan kebijakan. Langkah ini diimplementasikan secara langsung di lapangan. Di tingkat provinsi, isu-isu yang terkait dengan perlindungan lingkungan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi juga menjadi fokus diskusi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pihak-pihak lokal yang relevan, seperti instansi administrasi publik di bidang kehutanan, universitas, dan pusat pendidikan dan pelatihan profesional, menerima pelatihan mengenai perencanaan, penyelesaian konflik, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. FORCLIME mendukung berbagai inisiatif dan mekanisme internasional di bidang kehutanan dan lingkungan, seperti Pembagian Keuntungan dan Manfaat (Access and Benefit Sharing, ABS) serta Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Tujuannya adalah untuk menciptakan para pengambil keputusan di tingkat lokal yang dapat menerapkan konsep-konsep internasional.
3. FORCLIME mendorong keterlibatan penuh dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan iklim, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para pekerja yang

³¹ GIZ. Wald-und Klimaschutz (Forclime)

diperlukan. Semua langkah ini bertujuan untuk menerapkan konsep bioekonomi yang berbasis pada sumber daya hutan.³²

Peran Jerman sebagai negara maju memiliki dampak signifikan dalam membantu Indonesia melalui transfer teknologi dan pengetahuan. Sementara itu, Indonesia sebagai negara megadiverse dengan hutan tropis yang luas memberikan peluang untuk pengembangan proyek-proyek konservasi yang dapat memberikan manfaat lokal dan global. Namun, dinamika kerjasama ini juga bisa terpengaruh oleh perbedaan dalam interpretasi kebijakan, prioritas nasional, serta perbedaan dalam tingkat ketergantungan terhadap sumber daya hutan.

Menurut hasil Protokol Kyoto, Jerman termasuk dalam negara Annex-1 yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990. Pada tahun 1990, Jerman menghasilkan sekitar 1,251 juta ton CO₂, yang kemudian turun menjadi 942 juta ton CO₂ pada tahun 2010. Penurunan ini terjadi dalam berbagai sektor, termasuk industri, manufaktur, transportasi, bahan bakar, rumah tangga, pertanian, sampah, dan lainnya.³³

Jerman memainkan peran aktif dalam mendorong inklusi isu perlindungan iklim dalam agenda internasional. Dalam perundingan sebelum Protokol Kyoto pada tahun 1997, Pemerintah Federal Jerman telah berperan sebagai pelopor. Kesepakatan ini mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi GRK hingga tahun 2012, dengan target rata-rata 5,2% dibandingkan dengan tahun referensi 1990. Jerman telah melampaui target ini dengan menurunkan emisi

³² *Ibid.*

³³ Fajrin Fikrul Islamy, "Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) 2010-2016" (Tesis Magister, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2023), Hal.11

hingga 21% pada tahun 2012, terutama karena penurunan emisi karbon yang signifikan sejak tahun 1990.

Selain itu, dalam Rencana Aksi perubahan iklim Jerman, negara ini menargetkan penurunan emisi sebesar 40% pada tahun 2030 dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga setidaknya 80% dari tingkat tahun 1990 hingga tahun 2015. Untuk membantu negara Annex-1, Protokol Kyoto menawarkan tiga instrumen: Joint Implementation, Clean Development Mechanism, dan Emission Trading Scheme. Skema-skema ini berlaku hingga tahun 2012, yang juga merupakan tahun berakhirnya Protokol Kyoto.

Karena Jerman memiliki tingkat emisi GRK yang tinggi, negara ini berusaha untuk membayar utang karbonnya melalui kerjasama dengan negara-negara yang memiliki hutan luas. Jerman berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 710 juta euro untuk tujuan ini. Dana tersebut dibagi, dengan 57% digunakan untuk kerjasama multilateral dan 43% (sekitar 305 juta euro) untuk kerjasama bilateral.³⁴ Dana ini dialokasikan ke wilayah-wilayah seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, dan lainnya, dengan jumlah yang berbeda-beda. Selain kerjasama dengan Indonesia, Jerman juga menjalankan berbagai kerjasama internasional terkait perubahan iklim dengan skema yang serupa, namun dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Kerjasama bilateral Indonesia-Jerman dalam isu deforestasi mencerminkan kolaborasi dua negara yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak lingkungan. Dinamika kerjasama ini melibatkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan teknis antara dua negara yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang

³⁴ Ibid. Hal.11

berbeda. Dalam analisis dan pembahasan mengenai strategi kebijakan perubahan iklim dan deforestasi, memahami dinamika kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta dampak dari upaya bersama ini.

Indonesia memiliki luas hutan tropis yang signifikan dan merupakan salah satu negara megadiverse di dunia. Oleh karena itu, upaya mengurangi deforestasi memiliki dampak besar terhadap perubahan iklim global dan pelestarian keanekaragaman hayati. Indonesia juga dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk mendapatkan dukungan teknologi, pengetahuan, dan sumber daya finansial dari Jerman. Sebaliknya, Jerman sebagai negara maju dengan teknologi yang canggih dan komitmen terhadap lingkungan dapat memberikan bantuan teknis, transfer teknologi, serta dukungan finansial untuk program-program pengurangan emisi dan rehabilitasi hutan di Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Jerman dalam hal ini FORCLIME (Forest and Climate Change Management in Indonesia) fokus pada beberapa sasaran wilayah yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan timur, Sumatera, Papua dan Papua barat.³⁵

Saat ini badan pusat statistik mencatat data 2013-2021 deforestasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tingkat Deforestasi Wilayah Sasaran FORCLIME

No	Nama	Tahun								Total Defores tasi
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
1	Kalimantan Timur	19.169,7	50.465,4	54.341	47.490,9	32.597,1	34.792,3	5.330,25	10.462	254.648,65
2	Sumatera	14.723,7	321.941,6	21.826,3	53.516,2	16.574,1	82.382,3	-303,8	12.328	522.994,4
3	Papua	20.443,1	67.857,9	6.729,6	17.259,1	78.787,4	11.212,2	6.630,3	3.551	212.470,6

³⁵ FORCLIME. Kerjasama Indonesia-Jerman Di Bidang kehutanan dan Perubahan Iklim.

4	Papua Barat	1.848,9	12.307,7	10.221,1	31.228,7	-1.369,5	5.296,1	1.908,4	2.030,1	63.471,3
---	-------------	---------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	----------

Sumber: Badan Pusat Statistik³⁶

Pada table diatas tercatat tingkat deforestasi di beberapa wilayah Indonesia tertinggi ditahun 2014-2015 dengan jumlah 452.572,6 juta/ha hutan yang ada di wilayah Kalimantan Timur, Sumatera, Papua, dan Papua barat. Pulau semuatera dan Kalimantan timur menempati posisi teratas sebagai penyumbang deforestasi terbesar dengan jumlah 254.648,65 untuk Kalimantan timur dan 522.994,4 untuk Sumatera. Ditahun 2018 sesuai dengan fokus penelitian ini mengalami rate penurunan angka deforestasi yang signifikan dari tahun 2013-2018 di wilayah Papua (11.212,2), Kalimantan Timur (34.792,3), Papua Barat (5.296,1). Kecuali untuk wilayah Sumatera mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar (82.382,3), tetapi wilayah Sumatera termasuk wilayah yang angka deforestasinya mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014-2015. Data netto deforestasi Indonesia 2018-2019 yang dirilis KLHK pada April 2020 terjadi penurunan 5,6% di luar dan dalam kawasan hutan Indonesia seluas 462.400 hektare. Angka tersebut berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465.500 hektare dikurangi luas reforestasi sebesar 3.100 hektare.³⁷

Dinamika kerjasama ini mencakup pertukaran pengetahuan teknis dan teknologi yang berharga bagi Indonesia. Jerman memiliki keahlian dalam pengembangan teknologi terbarukan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta pemantauan deforestasi. Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat memperoleh

³⁶ Bps.2023. Angka Netto Deforestasi Di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan Tahun 2013-2021

³⁷ Pramono Dwi Susetyo, "Membandingkan Reforestasi dan Deforestasi Indonesia, 2021," Forest Digest.

akses terhadap metode yang lebih canggih dalam pemantauan deforestasi, peramalan dampak perubahan iklim, dan upaya rehabilitasi hutan. Pertukaran pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam penanganan deforestasi, tetapi juga membangun kapasitas untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih informasional.

Namun, dinamika kerjasama ini juga dapat memunculkan tantangan yang berkaitan dengan perbedaan dalam tingkat ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Indonesia sebagai negara dengan sektor kehutanan yang signifikan menghadapi dilema antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Jika upaya penanganan deforestasi mengurangi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, dapat muncul ketidaksetujuan dan resistensi dalam implementasi kebijakan. Di sisi lain, Jerman sebagai negara yang lebih bergantung pada teknologi cenderung memiliki pemahaman yang berbeda mengenai urgensi perlunya pelestarian hutan dan pemanfaatan berkelanjutan.

Selain itu, perbedaan dalam interpretasi kebijakan juga dapat mempengaruhi dinamika kerjasama. Meskipun Indonesia dan Jerman memiliki komitmen untuk mengatasi deforestasi, pemahaman mengenai langkah konkret yang harus diambil bisa berbeda. Misalnya, pendekatan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengizinkan pemberian izin eksploitasi hutan oleh perusahaan dapat berbenturan dengan tujuan Jerman dalam mengurangi jejak karbon global. Tantangan semacam ini memerlukan negosiasi dan harmonisasi pandangan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dinamika kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam isu deforestasi mencerminkan kepentingan dan peran yang beragam. Peran Jerman

sebagai penyedia teknologi dan dukungan finansial membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan teknis dan finansial dalam upaya mengurangi deforestasi. Namun, perbedaan dalam ketergantungan terhadap sumber daya hutan, interpretasi kebijakan, serta pandangan terhadap urgensi lingkungan juga memengaruhi dinamika kerjasama. Dalam mengatasi tantangan ini, penting bagi kedua negara untuk membangun dialog yang terbuka, mencari titik kesepakatan, dan memanfaatkan perbedaan sebagai peluang untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi deforestasi dan dampaknya terhadap perubahan iklim global.

4.3 Implikasi Teori Green Politik Dalam Kebijakan Perubahan Iklim

Green politics theory adalah pandangan alternatif dalam hubungan internasional yang mengkritik perspektif tradisional. Ketika dihadapkan dengan isu-isu spesifik, terutama isu lingkungan yang menjadi fokus utama. Berdasarkan pandangan Haeckel, environmentalism memandang kepentingan lingkungan hidup untuk sepenuhnya kepentingan umat manusia, sedangkan green politics memandang manusia sebagai bagian dari alam (ekosentrisme) oleh sebab itu manusia harus menjaga lingkungannya.³⁸ Dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Jerman, teori ini membantu menganalisis bagaimana perbedaan dalam pandangan politik, kebijakan, dan kepentingan internal mempengaruhi dinamika kerjasama. Jerman, yang menerapkan pendekatan hijau dalam politiknya, mendorong Indonesia untuk mengadopsi kebijakan yang lebih berkelanjutan terhadap hutan dan lingkungan. Teori green politik juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik terhadap isu perubahan iklim. Keterkaitan antara

³⁸ Lestari, Y. S. (2018). Environmentalism dan green politics: pembahasan Teoretis. Community: Pengawas Dinamika Sosial, vol.2(2). Hal. 196

deforestasi, emisi, dan dampak lingkungan melintasi batas nasional, mengindikasikan perlunya kerjasama global yang erat untuk mencapai hasil yang signifikan.³⁹

Dalam konteks analisis dan pembahasan mengenai strategi kebijakan perubahan iklim dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman terkait isu deforestasi pada tahun 2018, penerapan Teori Green Politik membantu memahami bagaimana pandangan politik, nilai-nilai, dan kepentingan yang berkaitan dengan isu lingkungan mempengaruhi dinamika kerjasama dan implementasi kebijakan. Dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman terkait isu deforestasi, Teori Green Politik memiliki implikasi penting. Pemerintah Jerman, yang telah mengadopsi pendekatan hijau (green approach) dalam kebijakan lingkungannya, mendorong Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Implikasi ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai lingkungan dari Jerman memengaruhi pandangan dan pendekatan diplomasi lingkungannya.

Dalam hal ini, kerjasama bilateral bukan hanya tentang pertukaran teknis dan finansial, tetapi juga tentang transfer nilai-nilai lingkungan. Jerman mempengaruhi Indonesia untuk memprioritaskan praktik keberlanjutan dalam kebijakan kehutanan dan penanganan deforestasi. Dengan demikian, Teori Green Politik menggambarkan bagaimana isu lingkungan dan keberlanjutan dapat membentuk dinamika hubungan internasional dan mempengaruhi keputusan politik.

Implikasi Teori Green Politik juga mencakup perbedaan dalam pandangan politik dan nilai-nilai antara negara-negara dalam kerjasama bilateral. Indonesia, sebagai negara megadiverse dengan tantangan pembangunan ekonomi dan

³⁹ Ibid. hal.199

sosial, mungkin memiliki kepentingan yang lebih kompleks dalam penanganan deforestasi. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi penduduk dapat bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Teori Green Politik membantu menggambarkan konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi interpretasi kebijakan dan dinamika kerjasama. Implikasinya adalah perlunya mencapai kesepakatan yang seimbang di antara nilai-nilai berbeda ini, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kompromi yang memungkinkan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, Teori Green Politik menyoroti bagaimana isu lingkungan dapat membentuk dan mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Dalam kasus ini, upaya mengatasi perubahan iklim dan deforestasi melalui kerjasama bilateral Indonesia-Jerman menciptakan dinamika baru dalam diplomasi lingkungan. Peningkatan fokus pada isu lingkungan dapat memperkuat kerjasama internasional, membentuk koalisi baru, dan mengubah dinamika kekuasaan dalam arena global.

Implikasi Teori Green Politik adalah bahwa isu lingkungan tidak hanya memengaruhi kebijakan, tetapi juga membentuk jejak diplomasi dan hubungan internasional.⁴⁰ Dalam kasus ini, Jerman memanfaatkan pendekatan hijau dalam politiknya untuk mempengaruhi pandangan dan tindakan Indonesia dalam hal deforestasi. Ini mencerminkan bagaimana isu lingkungan telah menjadi elemen penting dalam diplomasi dan kerjasama bilateral.

⁴⁰ Nurbaya Ali, S. I. T. T. I. (2018). Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi *Paris Agreement* pada *Cop (Conference of The Parties) 21 Paris* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

Penerapan Teori Green Politik dalam analisis mengenai strategi kebijakan perubahan iklim dan kerjasama bilateral Indonesia-Jerman terkait deforestasi memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana isu lingkungan mempengaruhi hubungan internasional dan kebijakan nasional. Implikasi ini mencakup transfer nilai-nilai lingkungan, perbedaan pandangan politik dan nilai-nilai, serta pengaruh isu lingkungan pada dinamika hubungan internasional. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pemahaman tentang implikasi Teori Green Politik dapat membantu negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan global.

4.4 Dampak Strategi Kebijakan Perubahan Iklim

Kebijaakan perubahan iklim Kerjasama Indonesia dan Jerman (FORCLIME) memulai perjalanannya pada tahun 2009 dan berlanjut hingga 2020, dengan berbagai perubahan fokus yang terjadi pada berbagai periode tertentu. Pada awal program, dari tahun 2009 hingga 2013, implementasi FORCLIME berpusat di tiga kabupaten di Kalimantan, yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau, dimana pada kawasan tersebut masuk ke wilayah HoB (Heart Of Borneo) yang memiliki tingkat deforestasi dan degradasi yang sangat memprihatinkan dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.⁴¹ Pada periode awal ini, yang berlangsung dari tahun 2009 hingga 2012, program terdiri dari tiga komponen utama: (1) penyediaan nasihat kebijakan, (2) pengelolaan hutan lestari dan kesiapan untuk REDD+, dan (3) upaya konservasi di kawasan Heart of Borneo (HoB).⁴²

⁴¹ FORCLIME. Kisah dari tepi. *Books document*. Hal 7

⁴² Ibid. Hal.10

Pada fase kedua, yakni dari tahun 2013 hingga 2016, FORCLIME mengalami perluasan dan peningkatan dengan terdiri dari enam komponen yang berbeda. Komponen tersebut meliputi penyediaan nasihat kebijakan kehutanan, pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sertifikasi pengelolaan hutan lestari, pengembangan ekonomi berbasis lingkungan (ekonomi hijau), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.⁴³

Masuk pada fase ketiga, dari tahun 2017 hingga 2020, FORCLIME melakukan evaluasi dan penyempurnaan dengan mereduksi enam isu strategis sebelumnya menjadi empat isu strategis yang diimplementasikan di wilayah-wilayah yang berbeda. Tiga isu strategis diterapkan di Kalimantan, meliputi kebijakan kehutanan dan dampak perubahan iklim (forest and climate change policy), pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, satu isu strategis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung diterapkan di Sulawesi Tengah, dengan tujuan mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi (Forest Programme III Sulawesi) yang mengintegrasikan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai) di wilayah Lanskap Lore Lindu atau Cagar Biosfer Lore Lindu.⁴⁴

FORCLIME merancang suatu sistem informasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencakup informasi terkait REDD+. Program ini juga memberikan dukungan untuk diskusi-diskusi awal tentang standar perubahan iklim di Kalimantan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di satu sisi, FORCLIME fokus pada upaya untuk hutan dan perubahan iklim dengan

⁴³ Ibid. hal. 11

⁴⁴ Ibid. hal. 11

mendukung target utama strategi REDD+, yaitu manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Jika KPH berjalan sesuai harapan, hutan bisa menjadi lestari dan menjalankan peran fungsionalnya.

Peningkatan kapasitas adalah fondasi utama kerja FORCLIME. Investasi FORCLIME dalam persiapan REDD+ bertujuan untuk menetapkan tingkat emisi sebagai referensi dan membangun sistem pelaporan, verifikasi, dan pemantauan (MRV) di tingkat kabupaten, termasuk pencatatan dan komponen langsung lainnya dalam mekanisme REDD+; mendukung peningkatan tata kelola, termasuk pengembangan KPH; dan mengklarifikasi hak kepemilikan dan penggunaan lahan.

FORCLIME juga mendukung KLHK dalam meningkatkan kerangka peraturan untuk pengelolaan hutan lestari melalui reformasi administratif, termasuk pembangunan KPH. Dukungan penting lainnya diberikan untuk persiapan pelaksanaan mekanisme REDD+ di masa depan. Kerjasama antara FORCLIME dan KLHK melibatkan persiapan regulasi dan struktur kelembagaan yang dibutuhkan, bersama dengan mitra-mitra dari program pembangunan lainnya. Perubahan dalam pendekatan ini tercermin dari pengalaman para pelaku perubahan di pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah melalui proses penyempurnaan kebijakan, peraturan, dan pedoman kerja.⁴⁵

Dampak positif ini dapat mengurangi emisi karbon dari deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengurangi risiko terjadinya bencana lingkungan. Peningkatan luasan hutan yang dihasilkan dari upaya rehabilitasi juga memiliki dampak pada siklus air dan kualitas udara, yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global. Dalam konteks analisis dan pembahasan ini,

⁴⁵ Ibid. hal.30

pemahaman mendalam tentang dampak ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama dan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim global.

1. Dampak positif pada penanganan deforestasi

Implementasi strategi kebijakan perubahan iklim yang efektif melalui kerjasama bilateral dapat menghasilkan dampak positif pada penanganan deforestasi. Dukungan teknis dan finansial dari Jerman memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan metode pemantauan deforestasi yang lebih canggih dan akurat. Sistem pemantauan yang lebih baik dapat membantu identifikasi dan penanganan awal aktivitas ilegal logging serta perubahan penggunaan lahan yang merugikan lingkungan. Selain itu, kerjasama ini juga dapat mendorong Indonesia untuk mengadopsi kebijakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Program rehabilitasi hutan dan penanaman kembali dapat memulihkan luasan hutan yang terdegradasi, meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon, dan melindungi habitat keanekaragaman hayati. Dampak ini tidak hanya mereduksi emisi karbon dari deforestasi, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan ekosistem yang penting bagi berbagai spesies.

2. Kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global

Dampak yang paling signifikan dari implementasi strategi kebijakan perubahan iklim dalam kerjasama ini adalah kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim global. Deforestasi adalah salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida. Melalui program pengurangan deforestasi dan rehabilitasi hutan, kerjasama ini dapat

mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari degradasi hutan dan penebangan liar.

Dengan mengurangi emisi karbon, kerjasama ini berpotensi berkontribusi pada pencapaian target global dalam mengatasi perubahan iklim. Dampak ini lebih jauh lagi, dapat memberikan manfaat dalam upaya mencapai tujuan perubahan iklim yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, yang mencakup pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius.

Dampak strategi kebijakan perubahan iklim dalam kerjasama bilateral Indonesia-Jerman terkait isu deforestasi mencakup pengurangan deforestasi, perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global. Meskipun dampak ini umumnya positif, perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul. Secara keseluruhan, implementasi strategi ini memiliki potensi untuk memberikan perubahan nyata dalam upaya mengatasi perubahan iklim global dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

4.5 Keberhasilan dan Hambatan

Keberhasilan kerjasama bilateral dalam isu deforestasi memiliki beberapa faktor penentu. Keberhasilan tergantung pada komitmen pemerintah, dukungan finansial yang berkelanjutan, transfer teknologi yang efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Keberhasilan juga dapat diukur dengan penurunan angka deforestasi, peningkatan luasan hutan yang terlindungi, dan adopsi praktik keberlanjutan oleh industri dan masyarakat.

Namun, beberapa hambatan juga dapat menghambat kesuksesan kerjasama ini. Perbedaan dalam interpretasi kebijakan, perbedaan dalam urgensi isu, serta tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan dapat memperlambat

kemajuan. Selain itu, masalah ekonomi, politik, dan sosial juga bisa mempengaruhi komitmen jangka panjang terhadap penanganan deforestasi.

Keberhasilan Kerjasama

Di bawah ini beberapa pencapaian berhasil dari upaya FORCLIME dalam mendorong berbagai bentuk pengelolaan yang penting, seperti tercatat dalam catatan penting selama proses pengembangan entitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

1. Prioritas Nasional untuk Pengembangan KPH

Keberhasilan awal dalam mereformasi sektor kehutanan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menjadikan pengembangan KPH sebagai prioritas nasional. Pemetaan ini terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra) 2015-2019. GIZ memberikan dukungan yang signifikan dalam mengembangkan strategi ini.⁴⁶

2. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

Selama beberapa tahun terakhir, FORCLIME telah memberikan dukungan dalam merevisi RKTN yang digunakan oleh kementerian, pemerintah provinsi, dan KPH dalam menyusun perencanaan mereka. Dukungan FORCLIME pada tingkat nasional dalam merevisi RKTN membawa perubahan dengan menyediakan data lebih akurat mengenai wilayah hutan yang legal, yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua lembaga dalam perencanaan mereka terkait wilayah hutan. FORCLIME juga terlibat dalam proses evaluasi dan revisi RKTN melalui penyediaan tenaga ahli. RKTN revisi pertama untuk tahun 2011-2030 diterbitkan pada 31 Juli 2019 melalui

⁴⁶ BAPPENAS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.41 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2019).⁴⁷ RKTN ini kini menjadi panduan umum untuk pengembangan sektor kehutanan di Indonesia. Revisi RKTN 2011-2032 menjadi landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam merancang studi latar belakang RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024. Pada tingkat provinsi, revisi RKTN menjadi landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) oleh KPH.

3. Evaluasi dan Revisi Peraturan Menteri (Permen)

FORCLIME turut serta dalam proses evaluasi dan revisi Peraturan Menteri P.01/Menhut-II/2006 dengan menyediakan tenaga ahli dan pengetahuan hingga pelaksanaannya. Peraturan yang telah direvisi ini ditetapkan pada 26 Agustus 2019 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penganggaran Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen baru ini sejalan dengan berbagai peraturan pemerintah terkait penyusunan rencana kerja kementerian dan mengoptimalkan mekanisme penyusunan rencana kerja dan penganggaran di lingkungan KLHK.⁴⁸ Ruang lingkup peraturan ini melibatkan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi lembaga KLHK di tingkat nasional dan daerah. Peraturan ini juga memberikan arahan tentang langkah-langkah penyusunan rencana kerja melalui forum koordinasi di tingkat provinsi, daerah, dan pusat, musyawarah dengan DPR, pertemuan

⁴⁷ JPNN. 2019. KLHK Lakukan Revisi Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional.

⁴⁸ FORCLIME. *BOOKS DOCUMENT*. Hal. 26

trilateral dengan Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan, serta musyawarah nasional dan rapat koordinasi perencanaan anggaran. Dengan adanya peraturan ini, KLHK dapat mendukung dan memfasilitasi KPH untuk mendapatkan Dukungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) melalui rencana bisnis yang diajukan kepada KLHK. Akses ini berpotensi mendukung pengembangan dan operasionalisasi KPH di seluruh Indonesia.

Hambatan dalam Kerjasama

1. Hambatan Kerjasama Teknis

Kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama teknis melibatkan koordinasi yang sulit di tiga kabupaten di Indonesia, yaitu Malinau, Berau, dan Kapuas Hulu, serta tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Masalah lain yang menjadi hambatan termasuk sulitnya pengadaan barang karena medan yang sulit dan terpencil menuju lokasi pelaksanaan program kerjasama teknis FORCLIME.⁴⁹

Dalam mendukung perencanaan strategis di bidang kehutanan jangka menengah dan jangka panjang, juga ditemui beberapa kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengaitkan dan menjelaskan keterkaitan antara perencanaan jangka panjang atau menengah dengan perencanaan tahunan atau operasional. Selain itu, menyelaraskan rencana dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda, seperti nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, masih dirasa kurang jelas. Kurangnya data yang memadai untuk mendukung proses perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi yang belum memadai, serta kapasitas lembaga dan sumber daya manusia untuk menyusun dokumen

⁴⁹ Fajrin Fikrul Islamy, "Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) 2010-2016" (Tesis Magister, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2023), Hal.13

perencanaan dan mengembangkan indikator yang dapat diukur juga merupakan kendala.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah terkait dengan konflik kehutanan, seperti sengketa lahan dan masalah perizinan, yang menghambat pelaksanaan program. Selain itu, dalam perencanaan strategis, terdapat kebutuhan untuk mengklarifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Terkadang, terdapat tumpang tindih antara berbagai tingkat pemerintahan dan hubungan yang tidak selaras antar mereka. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, FORCLIME berharap agar perencanaan di setiap tingkat menjadi lebih sejalan dan kooperatif.

2. Hambatan Kerjasama Keuangan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di Indonesia, yang mempengaruhi struktur pengelolaan hutan. Sistem pendanaan yang diterapkan, yaitu "on budget on treasury," dinilai memperlambat proses pencairan dana. Selain itu, tantangan lainnya adalah perbedaan dalam administrasi keuangan di berbagai kabupaten, yang mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah. Selanjutnya, setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2014, tugas pembantuan program FORCLIME-FC yang semula berbasis kabupaten dialihkan ke tingkat provinsi sesuai dengan kesepakatan terpisah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman.⁵⁰

Hal ini memengaruhi struktur program tersebut. Terlebih lagi, sebagian besar posisi dalam organisasi NPMU (National Program Management Unit) dan DPMU (District Program Management Unit) diisi oleh pejabat yang memiliki banyak tugas lainnya, baik struktural maupun non-struktural, yang telah sibuk

⁵⁰ Ibid. hal. 14

dengan tugas pokok mereka masing-masing. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program FORCLIME-FC, diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di lapangan, kendala operasional yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan umumnya terkait dengan kapasitas sumber daya manusia, situasi sosial ekonomi, dan kebiasaan masyarakat.

Keberhasilan dan hambatan dalam kerjasama bilateral Indonesia-Jerman dalam isu deforestasi mencerminkan dinamika kompleks antara faktor politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan keberhasilan memerlukan komitmen kuat dari kedua negara, pendekatan berkelanjutan, dan koordinasi yang baik. Dengan mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang, kerjasama ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mengatasi perubahan iklim global dan pelestarian lingkungan.

4.6 Rekomendasi Untuk Meningkatkan Efektifitas Kerjasama

Meningkatkan efektivitas kerjasama bilateral Indonesia-Jerman terkait isu deforestasi memerlukan upaya berkelanjutan dan koordinasi yang baik. Dalam analisis dan pembahasan ini, akan diuraikan secara mendalam mengenai rekomendasi-rekomendasi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan hasil dari kerjasama ini.

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Peraturan

Menguatkan kerangka hukum dan peraturan terkait kebijakan perubahan iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia adalah langkah penting. Hal ini meliputi peningkatan hukuman bagi pelaku ilegal logging, pengembangan peraturan yang mendukung praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, dan penguatan sistem pengawasan.

2. Peningkatan Pendekatan Partisipatif

Melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi strategi kebijakan perubahan iklim dapat meningkatkan efektivitas. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendapatkan dukungan lebih luas.

3. Pengembangan Teknologi dan Pemantauan

Investasi dalam pengembangan teknologi dan sistem pemantauan yang lebih canggih dapat meningkatkan akurasi dalam pemantauan deforestasi dan dampak perubahan iklim. Teknologi seperti citra satelit dan analisis data besar dapat membantu mengidentifikasi perubahan lahan dengan lebih cepat dan tepat.

4. Diversifikasi Sumber Dana dan Sumber Daya Manusia

Diversifikasi sumber dana dan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam mengatasi keterbatasan yang mungkin terjadi. Selain dukungan finansial dari Jerman, Indonesia dapat mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk sektor swasta dan lembaga internasional. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga penting untuk memastikan implementasi yang baik.

5. Pembangunan Program Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Membangun program edukasi dan kesadaran lingkungan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan. Pendidikan lingkungan sejak dini, kampanye kesadaran, dan pelibatan media sosial dapat membantu mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terkait lingkungan.

6. Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Koordinasi Internasional

Meningkatkan diplomasi lingkungan dan kerjasama internasional juga penting dalam upaya penanganan perubahan iklim. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan teknologi dalam mengatasi deforestasi.

7. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam evaluasi dan pemantauan adalah kunci untuk memastikan efektivitas kerjasama ini. Melalui pengukuran hasil dan dampak yang terus-menerus, Indonesia dan Jerman dapat mengidentifikasi perubahan tren, memperbaiki kebijakan yang ada, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Meningkatkan efektivitas kerjasama bilateral Indonesia-Jerman dalam isu deforestasi adalah tantangan yang kompleks, tetapi memiliki dampak yang sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim global dan pelestarian lingkungan. Dengan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi ini dan bekerja sama secara komprehensif, kedua negara dapat mencapai tujuan bersama dalam upaya melindungi hutan dan mereduksi dampak perubahan iklim secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi SDGs sebagai kerangka kebijakan lingkungan global telah menjadi penggerak utama dalam usaha mengurangi deforestasi. Kedua negara mengakui pentingnya menjaga keragaman hayati dan ekosistem hutan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam isu deforestasi telah membawa manfaat signifikan bagi kedua negara. Indonesia memperoleh dukungan teknis dan finansial dari Jerman untuk mengembangkan kapasitas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sementara Jerman mendapatkan peluang untuk berinvestasi dalam proyek-proyek lingkungan yang sejalan dengan tujuan pembangunan mereka.

Meskipun kerjasama bilateral ini memiliki potensi besar, implementasinya tidak selalu mulus. Tantangan dalam hal perbedaan budaya, regulasi, dan kepentingan domestik dapat memperlambat kemajuan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini. Teori green politik memberikan wawasan penting tentang dinamika politik dan kepentingan di balik kebijakan lingkungan dan kerjasama bilateral. Dalam hal ini, pemahaman tentang bagaimana aktor-aktor politik, termasuk kelompok masyarakat sipil dan industri, memengaruhi proses pengambilan keputusan menjadi krusial dalam memahami implementasi kebijakan.

Meskipun langkah-langkah positif telah diambil, perjuangan melawan deforestasi masih memerlukan transformasi lebih lanjut. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap praktik-

praktik ilegal, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hutan. Keberhasilan kerjasama bilateral dalam mengatasi deforestasi bergantung pada kontinuitas komitmen dan kerja sama antara Indonesia dan Jerman. Pembangunan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan alokasi sumber daya yang berkelanjutan akan menjadi penting dalam memastikan hasil positif jangka panjang.

penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan perubahan iklim berbasis SDGs mempengaruhi kerjasama bilateral dalam isu deforestasi antara Indonesia dan Jerman pada tahun 2018. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan lingkungan global tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi wujud konkret dari upaya bersama menuju pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa saran terkait kebijakan perubahan iklim SDGs terhadap kerjasama bilateral isu deforestasi Indonesia dan Jerman 2018 sebagai berikut:

1. Enhanced Transparency in Agreements

Mengupayakan peningkatan transparansi dalam perjanjian bilateral seperti MOU. Mendorong negara-negara untuk secara proaktif mempublikasikan versi yang tidak bersifat rahasia dari perjanjian tersebut agar dapat diakses oleh masyarakat, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Advocacy for Data Sharing

Mengajukan kampanye advokasi kepada pemerintah dan lembaga terkait agar lebih proaktif dalam berbagi data yang berkaitan dengan lingkungan dan kerjasama bilateral. Menunjukkan manfaat dari transparansi data dalam

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterbukaan.

3. Engagement with Stakeholders:

Melibatkan pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan keterbukaan data. Membangun koalisi yang mendukung transparansi dapat memberikan tekanan positif pada pihak-pihak yang terkait.

4. Public Awareness Campaigns

Melakukan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya keterbukaan data dalam konteks kerjasama bilateral dan isu lingkungan. Menjelaskan bagaimana akses terhadap informasi dapat memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bappenas. 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, Pilar Pembangunan Lingkungan, Edisi II.
- Barry, J. (2014). Green political theory. In *Political ideologies: An introduction*. Routledge.
- Dyer, H.C. (2020). Teori Hijau (Green Theory). In T. A. Mukti, Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Komojoyo Press)
- Eckersley, R. (2007). Green Theory. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press.
- Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional; Theories of International Relation* (Bandung: Nusamedia, 2009)

Jurnal:

- Aisyah, G. A. (2022). Kebijakan Perubahan Iklim Australia pada Masa Pemerintahan Scott Morrison terhadap Australian Bushfires Periode 2019-2020 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Apriwan, Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional, *Jurnal Multiversa Jurnal International Studies*, vol. 2(1) hal 39
- Islamy, F. F. "Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) 2010-2016." Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2023.
- Harpiandi, N. M. B. (2019). Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam Bidang Ekonomi Digital 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Kajian Green Politic Theory Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, vol. (7)2, hal. 59-76.
- Leontinus, G. (2022). Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, Vol. (5)1, hal. 43-52.
- Lestari, Y. S. (2018). Environmentalism dan green politics: pembahasan Teoretis. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, vol.2(2). Hal. 196

NURBAYA ALI, S. I. T. T. I. (2018). Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi Paris Agreement Pada Cop (Conference Of The Parties) 21 Paris (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

Novrialdi, E. Kepentingan Norwegia Mendukung Program Reducing Emission From Deforestation and Degradation (REDD) di Hutan Amazon Peru 2014. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 2(2)

Sosiawan, M. A. (2019). Kerjasama pertahanan Indonesia-Jerman dalam pengadaan senjata.

Turangan, F. D. (2022). *Peran April Group dalam Program Restorasi Hutan di Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019* (Doctoral dissertation).

Website:

BAPPENAS. "Sekilas SDG's" diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada tanggal 2 juli 2023 pukul 23:04

BAPPENAS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Diakses dari [http://stranasrr.bappenas.go.id/web/assets/web-file_article/document/\(buku-iii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019\)-BUKU%20III%20RPJMN%202015-2019.pdf](http://stranasrr.bappenas.go.id/web/assets/web-file_article/document/(buku-iii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-BUKU%20III%20RPJMN%202015-2019.pdf). Diakses pada tanggal 19 agustus pukul 11:07

BBC, "Deforestasi: Negara mana saja yang paling banyak membatat hutan?" Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59357389>, diakses pada tanggal 10 juni 2023 pukul 23;10.

BMUV. "What is international environmental policy about?". Diakses dari <https://www.bmuv.de/en/topics/europe-international/international/what-is-international-environmental-policy-about>, diakses pada tanggal 2 juli 2023 pukul 22:27.

Bps.2023. Angka Netto Deforestasi Di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan Tahun 2013-2021. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081-/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2021-ha-th-.html>. Diakses pada tanggal 13 agustus 2023 pukul 09:15

Fajri,D,L. 2022. Kerjasama Bilateral adalah Kerjasama dua negara. Diakses dari <https://katadata.co.id/intan/berita/6394894e0dc3d/kerjasama-bilateral-adalah-hubungan-dua-negara-ini-contohnya>. Diakses pada tanggal 05 agustus 2023 pukul 08:17

FORCLIME. Kisah dari tepi. Books document. Diakses dari <https://www.forclime.org/documents/Books/kisah-dari-tepi.pdf>. Diakses pada 14 agustus 2023 pukul 05:25

- FORCLIME. Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim. Diakses dari <https://forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/-Brochure%20Kerjasama.-pdf>, diakses pada tanggal 11 juni 2023 pukul 01:05
- FOREST DIGEST, "Penyebab Utama Deforestasi dan Degradasi Lahan", diakses dari <https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan>, diakses pada tanggal 10 juni 2023 pukul 23:18.
- GIZ. Supporting Indonesian Partners in Archieve the SDGs. 2017 diakses dari https://www.giz.de/de/downloads/giz-Indonesia-en-Indonesian-German%20-Cooperation_Towards%20the%20achievement%20of%20the%20SDGsWeb.pdf, diakses pada 10 agustus 2023 pukul 20:25
- JPNN. 2019. KLHK Lakukan Revisi Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/klhk-lakukan-revisi-rencana-kerja-kehutanan-tingkat-nasional>. Diakses pada 19 agustus 2023 pukul 14:30
- KOMAHI. 2021. "Green Politics". Diakses dari <https://komahi.uai.ac.id/green-politics/>, diakses pada tanggal 5 juli 2023 pukul 16:07.
- Nasruddin, A. (2019). "Lingkungan Global". Diakses dari <https://cerdasco.com/lingkungan-global/>, diakses pada tanggal 2 juli 2023 pukul 21:15
- Susetyo, Pramono Dwi. "Membandingkan Reforestasi dan Deforestasi Indonesia, 2021." Diakses dari <https://www.forestdigest.com>, diakses pada tanggal 8 september 2023 pukul 19:00
- UNDP. What are the sustainable development goals. diakses dari https://www-undp-org./united-states/sustainable-development-goals?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true, diakses pada 10 agustus 2023 pukul 17:19
- UNFCCC, "what is the Kyoto Protocol", diakses dari https://unfccc.int/-kyoto_protocol, diakses pada tanggal 10 juni 2023 pukul 22:50.
- UNFCCC, "The Paris Agreement", diakses dari <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>, diakses pada tanggal 10 juni 2023 pukul 22:55.
- WARDOYO, A. (2012). Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Jerman dalam DA-REDD Program FORCLIME di Indones (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).